

**MENGGUGAT STEREOTIP“PEREMPUAN
SEMPURNA”:
Framing Media terhadap Perempuan
Pelaku Tindak Kekerasan**

Aprilia Hening Puspitasari
Universitas Sebelas Maret
sariandriantoro@gmail.com

Widodo Muktiyo
Universitas Sebelas Maret
muktiyo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa Framing dan Teori Agenda Setting untuk melihat penggambaran media massa terhadap citra perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan stereotipnya, perempuan sempurna merupakan sosok yang *multi tasking*, lemah-lembut, bijak, penyayang, sabar dan pemaaf. Peneliti melihat penggambaran perempuan pada ruang gender yang berbeda dari beberapa media online. Hasil penelitian menunjukkan stigma inferioritas dan peran domestik masih kental dilekatkan dalam mengukur kesempurnaan perempuan. Dengan kekuatan mengkonstruksi realitas

dan membentuk opini publik, media belum sepenuhnya menghadirkan prinsip-prinsip jurnalisme empati. Pedoman pemberitaan dan penguatan jaminan negara terhadap penghapusan diskriminasi perempuan di media menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan peran media agar isu-isu kesetaraan gender dapat dipahami masyarakat.

Kata kunci: framing, kekerasan, media, perempuan, stereotip gender

Abstract

This research uses qualitative descriptive method, using framing analysis and Agenda Setting Theory to investigate how far mass media describe the image of women as perpetrators of children violation. Perfect women are often Stereotyped as multi-tasking figure, gentle, wise, compassionate, patient and forgiving. Researchers would like to describe women's portrayals in different gender spaces from several online media. The results shows that inferiority stigma and domestic role were still strongly attached to measure the perfection of women. With the power of constructing reality and shaping public opinion, the media has not yet fully embraced the principles of empathetic journalism. Guidelines for the publication and strengthening of state guarantees against the elimination of women discrimination in the media are an alternative solution to enhance the role of the media so that gender equality issues are understandable to the public.

Keywords: *framing, violence, media, women, gender Stereotip*

A. Pendahuluan

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak-anak dari waktu ke waktu semakin meningkat tajam. Tidak jarang pelaku kekerasan terhadap anak-anak adalah orang yang dikenal dan dekat dengan mereka seperti:

tetangga, teman, saudara, orang tua tiri, bahkan orang tua kandung sendiri. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terutama kekerasan fisik hingga penghilangan nyawa pada anak jumlahnya terus meningkat. Kasus kekerasan fisik (penganiayaan, perkelahian, pengeroyokan, dll) pada anak yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 94 kasus, 2012 sebanyak 57 kasus, 2013 sebanyak 215 kasus, 2014 sebanyak 273 kasus, 2015 sebanyak 197 dan 2016 sebanyak 84 kasus. Sedangkan kasus pembunuhan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 18 kasus pembunuhan terhadap anak dan meningkat tajam menjadi 86 kasus di tahun 2012. Tahun 2013 turun menjadi 62 kasus dan naik lagi menjadi 94 kasus di tahun 2014. Tahun 2015 ada 59 kasus dan tahun 2016 naik kembali menjadi 72 kasus (www.kpai.go.id, 2016).

Beberapa pelaku kriminal berupa kekerasan fisik dan penghilangan nyawa terhadap anak ternyata dilakukan oleh perempuan yaitu ibu kandung/ tiri. Pemberitaan tentang peristiwa kekerasan dan penghilangan nyawa anak-anak yang terjadi selalu diliput oleh media, karena isu ini memang “menarik” bagi insan pers, apalagi jika pelakunya adalah perempuan yang notabene merupakan ibu kandung/ tiri. Peristiwa yang mengandung kriminalitas pada anak-anak adalah salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Kekerasan fisik dan pembunuhan dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus-kasus kriminalitas berupa kekerasan fisik, lisan, pembunuhan, hingga mutilasi yang sadis.

Konstruksi gender bagi perempuan melekatkan sifat lembut, santun, sabar dan penyayang. Konstruksi ini terbentuk sejak ia lahir dan mengenal lingkungannya dan diperkuat oleh. Perempuan juga dikonstruksikan sebagai orang yang mudah menangis, meledak-ledak emosinya dan pemaarah. Stereotip terhadap perempuan inilah yang kemudian dibesarkan oleh industri media dan dibumbui melalui pemilihan diksi yang hiperbola dan cenderung menyudutkan.

Gender merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi (Faqih, 2001). Gender sebagai suatu konstruksi sosial terbentuk

melalui proses yang panjang. Ketimpangan gender terbentuk karena sosialisasi, kebudayaan, pola pikir keagamaan, dan kekuasaan negara. Gender mewariskan konsep pemikiran tentang wacana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk membenaran terhadap perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan hanya karena perbedaan kelaminnya. Gender adalah suatu konsep yang bersifat *nurture*, karena terbentuk oleh sistem sosial budaya sehingga dimungkinkan berbeda pada sistem budaya yang berbeda-beda. Sementara seks bersifat *nature* sebagai suatu hal yang esensial yang berasal dari Tuhan sebagai kodrat.

Di sisi lain, media massa yang merupakan agen budaya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sebab masyarakat modern mengkonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang tak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Media massa memang bukan merupakan sarana satu-satunya medium untuk berkomunikasi, tetapi posisinya telah menjadi semakin sentral dalam masyarakat yang anggotanya sudah semakin kurang berinteraksi secara langsung satu sama lain dimana media massa hadir praktis sepanjang hari dalam kehidupan masyarakat.

Budaya media (*media culture*) menunjuk pada suatu keadaan yang tampilan audio visual atau tontonan-tontonannya telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang (Kellner, 1996:164). Media cetak, radio, televisi, film, internet, dan bentuk-bentuk akhir teknologi media lainnya telah menyediakan defenisi-defenisi untuk menjadi laki-laki atau perempuan, dan membedakan status-status seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun seks.

Pendekatan feminis-strukturalis Simone de Beauvoir telah mengilhami Ortner (1974) dalam menilai bahwa subordinasi perempuan secara universal adalah dampak dan fungsi khas mereka dalam tradisi dan budaya yang melekat di masyarakat. Perempuan dianggap sebagai pengasuh dan orang yang bertanggungjawab dalam membesarkan anak. Perempuan juga selalu diidentifikasi pada ranah rumah tangga. Pada posisi yang berbeda, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai gender yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya

bertanggungjawab secara publik, bukan secara domestik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar hierarki menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai tersebut.

Konstruksi gender dalam konteks patriarki membuat perempuan sulit untuk mengubah “*takdirnya*”. Perempuan hingga sekarang tidak lepas dari penilaian dan konstruksi yang bias. Konstruksi ini pun merasuk dalam seni dan kebudayaan sehari-hari. Stereotip yang melekat pada perempuan berdampak pada pelanggaran kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan industri media merupakan propaganda terdepan dalam mengkampanyekan stereotip tersebut.

Artikel ini mengulas kemampuan media dalam melakukan analisis *framing* dimana media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik terhadap sebuah pemberitaan. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita yang akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan harapan apa yang diinginkan dalam membentuk opini pembaca. Pemberitaan oleh media dapat menjadi subjektif karena “isi” media dapat dikonstruksi oleh pemilik dengan beberapa penajaman dalam sudut pandang tertentu. Media dapat menjadi komunikator yang “memainkan” isi berita sehingga isi berita dapat dikontrol oleh media massa.

Framing media massa terhadap stereotip perempuan yang sempurna telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Goc (2009) menulis *Framing the news: ‘bad’ mothers and the ‘Media’ news frame* yang menggunakan metode framing dengan membingkai ketidakmampuan ibu kandung dalam memberikan perlindungan dan keselamatan pada kasus penculikan dan pembunuhan anak kandungnya. Alih-alih berempati pada ibu yang juga adalah korban karena kehilangan anak yang diculik atau dibunuh, media justru membombardir pemberitaan sehingga mereka digambarkan sebagai ibu yang buruk, yang paling bertanggungjawab dan berhak disalahkan terhadap kelalaian mengasuh dan memproteksi keselamatan diri sang anak dengan membentuk opini bahwa mereka adalah orang tua tunggal, wanita karier dengan mendasarkan Teori *Public Discourse*. Sedangkan artikel ini akan membahas framing media massa dengan teori Agenda Setting pada

kasus yang berbeda yaitu perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Disamping itu artikel ini juga memberikan alternatif solusi bagi media massa dalam perimbangan pemberitaan yang pro gender dengan beberapa cara.

Penelitian Kusuma dan Vitasari (2017) tentang citra perempuan dalam *new media* berjudul *Gendering the Internet: Perempuan pada Ruang Gender yang Berbeda* membandingkan penggambaran perempuan yaitu hubungan perempuan dengan teknologi dan cara perempuan direpresentasikan melalui teknologi di dua situs gaya hidup berbasis gender yaitu *Vemale.com* dan *Sooperboy.com*. dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua situs menampilkan perempuan yang sudah merambah ruang publik, namun bayang-bayang peran domestik pada ruang privat masih diikutsertakan

Penelitian ini menggunakan teori *Agenda Setting* yang dipopulerkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw dimana media massa dapat membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting melalui teknik pemilihan serta penekanan tentang isu yang lebih penting untuk disajikan bagi khalayak. Media massa mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Teori ini mendasarkan pada kekuatan media dalam memengaruhi opini publik tentang suatu peristiwa (Griffin, 2012:378). Dalam hal ini, akan dipetakan dan dibandingkan pemberitaan media massa online dalam memandang perempuan sebagai pelaku kekerasan dari sudut pandang yang lebih humanis, namun di sisi lain akan dilihat pula pemberitaan media yang tidak berimbang bahkan cenderung menyudutkan perempuan berdasarkan stereotip gender tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan tersebut.

B. Pembahasan

1. Gender dan Media

Gender didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993:4). Menurut Showalter gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (1989:3). Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender merupakan suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan

peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004:4). Gender berujud pembagian peran serta tanggung jawab, baik lelaki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya seperti keyakinan bahwa lelaki itu kuat, kasar, dan rasional, sedangkan perempuan lemah, lembut, dan emosional. Konstruksi gender bukanlah ketentuan kodrat Tuhan, melainkan hasil sosialisasi melalui sejarah yang panjang sebagai konsep buatan masyarakat atau konstruksi sosial. Pembagian peran, sifat, maupun watak perempuan dan lelaki dapat dipertukarkan, berubah dari masa ke masa, dari tempat dan adat satu ke tempat dan adat yang lain, dan dari kelas kaya ke kelas miskin.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Perempuan masih tetap menduduki posisi tertinggi sebagai korban ketidakadilan gender. Menurut Fakih (2001), ketidakadilan gender direfleksikan dalam berbagai ketidakadilan, berupa marginalisasi ekonomi, subordinasi dalam keputusan politik, pembentukan stereotip, kekerasan, beban kerja berlebih, serta sosialisasi ideologi peran gender. Ketidakadilan gender ini menimbulkan gugatankam feminis, yang muncul dari kesadaran terhadap penindasan wanita dalam masyarakat, baik di tempat kerja ataupun konteks masyarakat makro serta tindakan sadar, baik oleh perempuan maupun laki-laki dalam mengubah keadaan tersebut.

Di sisi lain, media merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi gender pada masyarakat. Media memiliki karakteristik jangkauan yang luas, sehingga sangat efektif dalam menyebarkan konstruksi gender kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan gender, para pekerja di bidang media perlu sensitivitas yang tinggi sehingga menghasilkan jurnalisme yang berperspektif gender. Bias gender yang terjadi pada Para pelaku di media massa (jurnalis dan institusi media) disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kemampuan profesional, etika dan perspektif pelaku media massa terhadap permasalahan gender masih rendah. Akibatnya, hasil penyiaran belum sepenuhnya mampu mengangkat permasalahan perempuan pada arus utama (*mainstream*). Penumbuhan rasa empati terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, merupakan salah satu jalan bagi media untuk bertindak *fair*, proporsional, serta berimbang dalam memberitakan kasus-kasus yang melibatkan perempuan. *Kedua*,

media massa belum mampu melepaskan diri dari perannya sebagai medium ekonomi kekuasaan, baik yang datang dari penguasa, otoritas intelektual, ideologi politik, ataupun pemilik modal. Media massa yang seharusnya menjadi “*watchdog*” bagi kekuasaan, justru terjerumus menjadi pelestari kekuasaan hanya karena lemahnya kemampuan profesional dan etika media massa. Akibatnya, perempuan menjadi korban dari aroganisme pelanggaran kekuasaan. *Ketiga*, kurangnya peran aktif dan representasi perempuan dalam media massa menjadikan perempuan sulit untuk keluar dari posisi keterpurukannya saat ini. Media massa Indonesia masih dikuasai oleh budaya patriarki dan kapitalisme dengan dominasi laki-laki di dalamnya. Media seharusnya meningkatkan jumlah praktisi perempuan serta menempatkan perempuan tidak lagi sebagai objek, tetapi berperan aktif sebagai subjek. *Keempat*, perlu perubahan paradigma pada media massa berkaitan dengan pencitraan perempuan yang selama ini dipakai. Pencitraan perempuan dalam media, yang selama ini cenderung seksis, objek iklan, objek pelecehan dan ratu dalam ruang publik, perlu diperluas wacananya menjadi perempuan yang mampu menjadi subjek dan mampu menjalankan peran-peran publik dalam ruang publik (Siregar, Pasaribu, Prihastuti, 2002: 219).

Diskursus jurnalistik perlu diubah agar jurnalis tidak terjerumus menjadi pengguna kekerasan, pengabsah ketertindasan pada perempuan, dan pelanggaran kultur ketidakadilan yang selama ini melingkupi perempuan. Kalau selama ini pendekatan jurnalistik yang dipakai media berpola konservatif, maka jurnalistik perlu didorong untuk beralih menjadi jurnalistik progresif atau jurnalistik empati. Jurnalistik yang mengajarkan masyarakat mengembangkan sikap-sikap yang emansipatoris, kritis, non eksploitatif, nondiskriminatif, demokratis, tetap proposional dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah dasar jurnalistik yang telah disepakati sebelumnya. Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, media setidaknya mempertimbangkan kepentingan praktis dan strategis perempuan (Siregar, Pasaribu, Prihastuti, 2002:222). Terbentuknya pemahaman perspektif gender diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat dalam menghadapi keberadaan kaum perempuan, sekaligus menepis pandangan negatif yang cenderung diskriminatif dan berbias gender. Dimasukkannya media massa sebagai satu dari dua belas landasan Aksi Deklarasi Beijing menunjukkan

bahwa peran media massa menjadi sangat strategis untuk membantu perempuan lepas dari ketertindasannya selama ini. Media massa mampu menjadi kekuatan positif untuk mengangkat harkat dan status hukum perempuan dalam relasi gender. Hanya saja perlu diwaspadai karena pada peluang yang sama, media massa bisa sekaligus berubah menjadi virus yang justru semakin memperburuk posisi perempuan.

2. Media di Tengah Konstruksi Realitas Sosial

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam buku *The Social of Construction Reality*. Realitas tidak dibentuk secara ilmiah dan tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini, realitas berwujud ganda atau plural di mana setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang dimiliki masing-masing individu (Eryanto, 2002:15). Gagasan Berger bahwa konteks berita harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas menyiratkan adanya kemungkinan sebuah peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Tidak jarang, pemaknaan yang dilakukan melalui produk media telah menempatkan posisi produk media sebagai bagian dari realitas sosial itu sendiri. Artinya, realitas dengan seperangkat nilai yang terbangun melalui produk media akan dimaknai oleh alam pikiran khalayaknya sebagai sesuatu yang nyata (*real*) terjadi, yang oleh Baudrillard disebut sebagai *hiperrealitas* (Piliang, 2000:228). Dalam posisi semacam ini, citra relasi laki-laki dan perempuan dalam produk media berada pada posisi konfirmatif, yaitu mendukung nilai atau norma yang telah ada di masyarakat.

Setiap wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat pada cara wartawan mengonstruksi peristiwa dalam pemberitaannya. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil melainkan produk interaksi wartawan dengan fakta. Realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita, tetapi melalui proses. Diantaranya, proses internalisasi wartawan atas realitas yang diamati dan diserap dalam kesadarannya. Proses selanjutnya adalah eksternalisasi. Dalam proses ini, wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika ini. Konstruksi realitas

terbentuk bukan hanya dari cara wartawan memandang realitas, tetapi kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu mempengaruhi cara media massa tersebut mengonstruksi realitas. Menurut Hamad, karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidak berlebihan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (1999:55).

Dalam area publik, berbagai isu maupun permasalahan sosial seperti kriminalitas, kekerasan dan bahkan pembunuhan yang dilakukan perempuan terutama ibu kandung/ tiri terhadap anak-anak menjadi konsumsi publik yang disajikan dengan berbagai perspektif oleh media yang meliput. Bukan hanya sebagai komunikator, media juga menempatkan diri sebagai pelaku dalam mendefinisikan realitas sosial dan memilih isu apa yang dianggap penting dan relevan. Fenomena ini ditandai dengan semakin tumbuh suburnya industri media komunikasi dengan berbagai macam informasi yang beragam dan melimpah. Sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak lagi hanya menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting. Media semakin berani menulis dan membangun sebuah realitas sosial di luar sumber-sumber formal kekuasaan. Kondisi ini juga mengakibatkan media mampu memengaruhi opini publik dengan *framing* terhadap sebuah pemberitaan. Dengan analisis *framing* dapat diketahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita, sehingga sangat menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan harapan apa yang ingin dicapai melalui pembentukan opini pembacanya.

Berikut ini adalah contoh beberapa headline pemberitaan media online tentang perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan yang tidak berimbang yang semakin menyudutkan stereotip perempuan yang menggiring opini pada kekejaman dan kengerian yang ditimbulkan melalui diksi kata yang digunakan.

Detiknews.com melansir berita yang diberi judul *Diduga Stres, Ibu di Medan Bunuh AnakKandung Berusia 2,5 Tahun*. Dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa pelaku diduga stress, berkepribadian tertutup,

pendiam sehingga diduga memiliki pemikiran-pemikiran aneh. Bila diajak berbicara seringkali tidak fokus pada arah pembicaraan, mengalami kebingungan serta sering berbicara sendiri (detiknews.com, 15/01/2017 diakses pada 28/08/2017).

Liputan6.com menurunkan berita berjudul *Ibu Kejam, Simpan Bayi Kandungnya di Kulkas hingga Tewas*. Dalam pemberitaan ini dituliskan bahwa pelaku melakukan hal keji itu karena tidak mau anak kedua yang dilahirkannya menjadi beban hidup dan terlantar seperti anak pertama, yang ternyata kedua anak tersebut diperoleh dari hasil perkawinan siri. Saat proses persalinan anak tersebut dilakukan sendiri di dalam kamar mandi. Usai melahirkan bayinya, pelaku nekat memotong tali pusar anaknya sendiri. Kejadian tersebut bahkan tak diketahui suaminya (liputan6.com, 07/08/2017 diakses pada 09/09/2017).

Headline dalam idntimes.com yang berjudul *Tega, Seorang Ibu di Palembang Tendang Anaknya Hingga Tewas*. Dalam berita ini dituliskan seorang anak meregang nyawa setelah menerima tendangan dari sang ibu. Belakangan, diketahui bahwa kekerasan yang Siska lakukan justru dilatari pertengkarnya dengan sang suami. Dia melakukan hal tersebut karena sedang bertengkar dengan sang suami sehingga tersulut emosi. Pelakupun melampiaskan emosinya kepada anak kandungnya (Idntimes.com, 23/11/2016, diakses pada 09/09/2017).

Perbedaan sikap jurnalis yang melakukan penulisan berita dapat terlihat jika berita tersebut dibandingkan dengan penulisan headline pemberitaan pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam beberapa media lain dimana penulisan dilakukan dengan menonjolkan sisi humanisme. Headline dalam Geotimes.co.id berjudul "Ketika Ibu Kandung Memutilasi Sang Buah Hati". Pemberitaan ini menulis tentang Mutmainah alias Iin (28 tahun), seorang ibuyang tega menghilangkan nyawa dan memutilasi anak kandungnya sendiri yang masih berusia satu tahun. Dalam berita tersebut, lebih mengangkat faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi Mutmainah sehingga tega menghilangkan nyawa anak kandungnya. Meskipun secara hukum dan sosial tindakan tersebut tidak dibenarkan, namun media mencoba menuliskan dari sisi yang lebih humanis. Alih-alih menyudutkan dan mengutuk perbuatannya, media lebih menonjolkan untuk menulis faktor-faktor yang memicu tindakan kekerasan, bahkan disertai penghilangan nyawa yaitu depresi yang

berkepanjangan akibat peran pengasuhan anak yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, tanpa adanya dukungan dari suami dan keluarga terdekatnya. Sang suami berprofesi sebagai polisi yang sibuk bekerja dan mencari nafkah sementara kondisi rumah tempat tinggal tidak layak huni, dengan ruangan yang sempit, pengap dan tanpa ventilasi memadai yang ditinggali oleh Mutmainah, suami, dan dua anaknya. Diketahui bahwa Mutmainah juga cenderung tertutup, tidak pernah keluar rumah dan tidak berhubungan dengan keluarga. Kuat dugaan, beban ekonomi yang berat dengan semakin bertambahnya anak, kondisi fisik dan psikis yang lelah tanpa ada tempat mengadu serta ketidakberdayaan dalam “*menggugat*” kondisi inferioritasnya yang serba penurut dan pantang mengeluh, yang menyebabkan ia nekat melakukan perbuatan tersebut (Geotimes.co.id., 06/10/2016, diakses pada 09/09/2017).

Media lain seperti KOMPAS.com menulis sebuah headline berjudul “Pretty Bunuh Anaknya Sendiri Diduga karena Depresi Ditinggal Suami”. Pretty Hasibuan melakukan tindakan kekerasan yang disertai penghilangan nyawa anak kandungnya sendiri, Muhammad Altahir diduga karena depresi ditinggal pergi suaminya enam bulan lalu. Sejak kepergian suaminya, Pretty tinggal di rumah kakaknyadi Jalan Besar Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan sementara dari keterangan para saksi menyatakan pelaku mengalami depresi karena ditinggal suaminya (Kompas.com, 15/01/2017, diakses pada 09/09/2017).

Perempuan seringkali harus *merepresi* kemarahannya karena perempuan dikonstruksi sebagai sosok ibu yang sempurna, sosok penyayang dan penyabar sedemikian rupa sehingga perempuan yang marah seringkali dianggap “*gila*”. Perempuan yang normal tidak seharusnya marah-marah. Padahal, “*kegilaan*” tersebut seringkali pada akhirnya memang merupakan manifestasi dari kemarahan yang tidak tersalurkan tersebut. “*Kegilaan*” menjadi bentuk perlawanan terhadap konstruksi yang terlalu kuat merepresinya. Kemarahan perempuan acapkali dianggap remeh, tidak berdasar dan irasional. Hak perempuan untuk (merasa) marahpun seringkali diabaikan. Perempuan dituntut untuk selalu tampil sebagai sosok yang pengasih, penyayang, pemaaf dan seringkali itu bermakna pelupa, yaitu lupa akan segala kesakitan, penyesalan, kekesalan, dan kelelahan (Prabasmoro, 2006:4). Label tersebut semakin dihembuskan kencang oleh media melalui pemilihan

diksi, bahasa dan konstruksi berita disertai dengan bumbu kata-kata yang bombastis serta kontradiktif (kejam, tega, stress, dan lain-lain) sebagai pengingkaran terhadap citra perempuan yang sempurna. Pada titik inilah, kualitas isi berita bukan lagi menjadi hal penting, namun nilai jual sebuah berita yang bombastis yang dijadikan acuan.

Umumnya, sejenak apa pun dan semarah apa pun orangtua kepada anaknya, biasanya yang mereka lakukan adalah membentak, memarahi anaknya, atau maksimal memukul korban dengan ancaman agar tidak lagi mengulangi tindakannya yang dinilai keliru. Analisa psikologis menyebutkan paling tidak ada tiga kemungkinan faktor penyebab yang mempengaruhi atau memicu timbulnya tindakan kekerasan terhadap anak oleh ibu kandung.

Pertama, karena sang ibu sedang mengalami depresi. Yang dimaksud depresi di sini adalah perasaan *dysphoric* yang mengendap lama, yang kemungkinan berhubungan dengan adanya perasaan merasa tidak berharga, keinginan bunuh diri, sulit konsentrasi, mengalami psikosomatis, dan lain-lain, yang kemudian memicu pelaku melakukan aksi yang di luar nalar akal sehat. Seseorang yang tengah mengalami masalah dalam keluarganya, misalnya, tidak mustahil akan mengalami depresi berkepanjangan.

Kedua, karena sang ibu *skizofrenia*. Berbeda dengan depresi yang acapkali menyebabkan pelaku membunuh dirinya sendiri, seorang penderita *skizofrenia* cenderung bersikap aktif dan tak sadar apa yang dilakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengidap *skizofrenia* seringkali tidak menyadari kaitan antara satu episode dengan episode dalam kehidupannya, karena tidak saling terhubung. Seseorang yang sifatnya pendiam (*introvert*) acapkali lebih mudah terjerumus menjadi penderita *skizofrenia*.

Ketiga, karena sang ibu mengalami gangguan kejiwaan kronis, mengalami halusinasi, seperti merasa mendengar bisikan dan lain hal yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan di luar nalar. Seseorang yang memiliki persoalan pribadi yang tak kunjung terpecahkan, tetapi hanya memendam sendiri persoalan yang dihadapi, cepat atau lambat akan mengalami gangguan jiwa yang dapat memicu tindakan lain yang tidak masuk akal (Suyanto, 2016).

Berbeda dengan tindakan agresif instrumental yang didorong oleh

kepentingan dan tujuan tertentu, faktor psikologis yang mempengaruhi pelaku dalam peristiwa kriminal tersebut tampaknya adalah rangsangan afektif yaitu tindakan impulsif sesaat yang berkombinasi dengan gangguan kejiwaan kronis yang lama terpendam. Kasus pembunuhan dan mutilasi bocah balita yang dilakukan ibu kandungnya sendiri ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadi tanpa bisa dipahami nalar normal masyarakat. Berbeda dengan kasus *child abuse* yang menimpa anak-anak yang memang tidak dikehendaki kelahirannya, dalam kasus Mutmainah ada tanda tanya besar yang belum terjawab. Apakah perilaku ibu muda ini sejak lama memang terasa janggal, ataukah perilaku sadis yang dilakukan sama sekali tidak terduga itu muncul karena dorongan hal-hal yang irasional? Apakah Mutmainah merupakan sosok yang memang tertutup, ataukah sebelumnya sama sekali tidak ada tanda-tanda yang mengindikasikan kemungkinan pelaku mengalami gangguan kejiwaan? Untuk itu perlu pemberitaan berimbang dari media agar khalayak mau belajar dari kasus-kasus kekerasan dalam pemberitaan media tersebut dan bersikap lebih peka (*aware*) terhadap indikasi-indikasi dari kejanggalan/ penyimpangan perilakusosial anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang berpotensi mencelakakan anak-anak.

Hingga saat ini peran dan ruang gerak perempuan dalam pembangunan dijabarkan dalam Panca Tugas Wanita: (a) sebagai istri dan pendamping suami, (b) sebagai pendidik dan pembina generasi muda, (c) sebagai ibu pengatur rumah tangga, (d) sebagai pekerja yang menambah penghasilan negara dan sebagai anggota organisasi masyarakat khususnya organisasi perempuan dan sosial (Murniati, 1992:27). Hal tersebut tercermin dalam ungkapan dari dapur ke sumur, dari sumur ke kasur, dari kasur ke dapur, atau ungkapan lainnya yakni ‘masak, *macak, manak*’ (Imron & Nasucha, 2009: 99). Cara pandang masyarakat yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender menempatkan perempuan pada peran domestik yakni sebagai pendamping suami dan ibu yang mengasuh anak bahkan setelah memiliki anak, seorang perempuan dapat berperan sebagai suami sekaligus istri dalam rumah tangga. Akibatnya, sebagai pendidik dalam keluarga, perempuan merupakan pihak pertama yang harus disalahkan atas ketidakberesan yang terjadi pada anak-anak, misalnya kenakalan dan kebrutalan.

Konstruksi realitas pada media massa sangat dipengaruhi oleh hubungan kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupi media dan

berbagai tekanannya. Gebner menggambarkan pola komunikasi massa dalam situasi yang tertekan yang berasal dari berbagai “kekuatan” luar, termasuk klien (misalnya para pemasang iklan), penguasa (hukum dan politik), pakar, institusi lainnya dan khalayak. Kenyataannya tidak ada satu pun kekuatan atau bentuk pengaruh yang terpisah atau terisolasi. Semua kekuatan tersebut berbaur, tumpang tindih, dan saling mendesak. Akumulasi kekuatan dan pengaruh memberikan kedudukan dominan pada beberapa institusi tertentu dalam komunikasi massa dan masyarakatnya (McQuail, 1996:141).

3. Peranan Media Massa

Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern menurut McQuail (2000:66) memiliki enam perspektif. *Pertama*, media massa merupakan jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat, dimana media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. *Kedua*, media merupakan cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat yang merefleksikan apa adanya. Para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, gambar/ visual peristiwa berdarah, sadisme dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian. Media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, arah, *angle* dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. *Ketiga*, media massa merupakan penyaring (*filter*) atau penjaga gawang (*gatekeeper*) yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media selalu memilih isu dan informasi. *Keempat*, media massa merupakan *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter* yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. *Kelima*, media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan (*feedback*). Dan *keenam*, media massa sebagai *interlocutor* yang tidak hanya sebagai tempat berlalu lalangannya informasi, tetapi juga patner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Ada beberapa argumen yang kerap dilontarkan terhadap kecaman dan kekhawatiran mengenai efek media. Rangkaian pembelaan yang

sering dilontarkan misalnya, media massa memiliki dampak terbatas pada khalayak karena khalayak pada dasarnya mempersepsikan media sebagai sesuatu yang sekadar ‘menghibur’, sekadar main-main, tidak nyata. Argumen bahwa media massa sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai faktor utama atau faktor tunggal yang mempengaruhi persepsi masyarakat karena media pada dasarnya sekadar mencerminkan budaya dominan masyarakat, dan sebenarnya ada banyak agen sosial lain yang mempengaruhi masyarakat: keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga agama.

Kendatipun ada kebenaran dalam argumen tersebut, tetap saja itu tak bisa digunakan untuk meremehkan efek media dalam isu gender. Dalam media di Indonesia stereotip ini melekat dalam berbagai tayangan; dari sinetron, infotainment, telewicara, hingga berita. Masyarakat terdiri dari beragam manusia, beragam latar belakang pendidikan, dan beragam usia, yang terus-menerus menerima penggambaran perempuan dalam cara yang konsisten. Media massa memang bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya. Efek media juga akan semakin kuat mengingat sosok perempuan yang ditampilkannya adalah cara yang memperkokoh stereotip yang sudah terbangun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, media massa memang bukan yang melahirkan ketidaksetaraan gender melainkan memperkokoh, melestarikan, bahkan memperburuk segenap ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan gender dan citra perempuan, Tuchman memberikan pandangannya tentang peran media massa. *Pertama*, media massa merefleksikan dalam bentuk citra atau representasi nilai-nilai dominan masyarakat, termasuk citra tradisional atau stereotipikal atas perempuan di semua bentuk media. *Kedua*, media massa bertindak sebagai agen sosialisasi dengan mengirimkan berbagai citra perempuan yang terstereotip dalam peran seksualnya sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan budaya antara citra media dan peran nyata perempuan dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan. Citra perempuan dalam media juga dipengaruhi oleh hubungan antara organisasi media, isi dan efek sosial, yaitu : (1) hanya sedikit perempuan yang memegang posisi kekuasaan dalam organisasi media sehingga, (2) isi media mendistorsi status perempuan dalam dunia sosial melalui penggambaran “perempuan

pasif". Hal-hal inilah yang mencegah dan menghambat pencapaian perempuan serta meneguhkan stereotip perempuan hanya sebagai istri dan ibu dalam konteks domestik/ keluarga (Thornham, 2010:73-74).

Ketika media massa menyajikan sebuah anggapan tentang perempuan secara konsisten, orang menjadi menyangka bahwa pilihan yang paling logis adalah mengikuti apa yang tampak sebagai kecenderungan umum sebagaimana yang disajikan media. Contoh, seorang ibu yang biasa digambarkan penyayang, pemaaf, sabar dan multi tasking bisa saja akhirnya merasa harus tampil dengan pakaian yang sopan, berbincang seperlunya (cenderung diam) dan menutupi problematika pribadi/ keluarga meskipun sebenarnya menyimpan banyak amarah dan kegelisahan psikis maupun fisik. Berbicara dengan tutur bahasa yang santun dilakukan karena menganggap bahwa penampilan seperti itu adalah tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat akibat konstruksi media. Dengan demikian, peran media massa tidak bisa dipandang remeh. Dalam hal ini, harus ditekankan bahwa dampak media tidak sesederhana seperti yang dibayangkan sebagian pihak. Media massa bukan saja mengajarkan, tetapi juga meneguhkan skema yang sudah terbangun, memberi membenaran, bahkan mendukung kondisi yang memfasilitasi praktek-praktek penindasan perempuan. Efek berjangka panjang ini dapat dilihat dalam isu efek perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan.

Berkaitan dengan dilema di atas, ada dua alur pemikiran menurut Dhakidae. *Pertama*, menyangkut kebijakan keredaksian (*editorial policy*). Alur ini merupakan rambu-rambu perspektif gender yang merupakan alur kebijakan intelektual-profesi media bersangkutan. Visi, misi dan target empatinya, yaitu nyata-nyata menetapkan pembelaan atas hak-hak azasi manusia serta pembelaan kepada mereka yang tertindas. *Kedua*, adalah kebijakan sesaat (*discretions*). Alur kedua ini lebih disebabkan oleh wacana yang ada dalam diri (*psyche*) pengelola dan pelaku media itu sebelumnya. Tindakan itu terbawa oleh kebiasaan yang menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan adalah *common sense*. (Siregar dkk, 2000:460).

Selain dua alur tersebut di atas, peran *newsroom* dalam media juga patut diperhitungkan (Soemandoyo, 1999:223-244). Hal ini berawal dari keinginan untuk menjadikan *newsroom* yang bebas nilai. Fungsi *newsroom* sebagai sebuah forum demokrasi institusi jurnalistik media

teruji di sini. Dalam hal ini, sebuah proses keputusan pemberitaan berspektif gender mengalir dan disiarkan tanpa adanya bias. Walaupun kebijakan keredaksian ‘melarang’ membuat produk yang memunculkan kekerasan terhadap perempuan, tetapi ketika kebijakan berdasar ‘kebiasaan’ memperbolehkannya. Oleh karena itu, akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang berulang. Bahkan, pada suatu titik tertentu menjadi ‘kebiasaan alamiah’ yang mendorong pada pencapaian realitas budaya yang terabsahkan.

Industri media juga bersikap todak adil terhadap perempuan. Media cetak dalam kultur industri di Indonesia turut membesarkannya. Hal ini bisa kita lihat dari periodisasi pers di Indonesia. Dari perspektif perempuan, pers di Indonesia memang telah mengalami dua periode yang memprihatinkan. Pada era Orde Baru, media berada dalam kekangan pemerintah. Pers dilarang untuk kritis, tidak ada kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Kondisi ini juga membuat minimnya penguatan perempuan di media. Isu perempuan dikonstruksikan sesuai selera pasar. Banyak media massa yang muncul hanya menawarkan konsumerisme dan justru mengkonstruksikan kembali perempuan sebagai orang mengurus domestik. Selain itu lebih banyak media di jaman Orde Baru menuliskan perempuan sebagai bagian dari gaya hidup modern. Ini adalah periode terburuk dalam kehidupan pers berperspektif perempuan di Indonesia.

Sejak peristiwa reformasi 1998 hingga saat ini, katup kebebasan yang dulu tertutup dibuka lebar untuk pers. Namun saat ini pers di Indonesia tumbuh secara liberal. Pada masa ini, seharusnya suara publik/masyarakat banyak didengar, namun justru yang terjadi sebaliknya yaitu media hanya melayani informasi terkait kehidupan elit, merendahkan perempuan terutama melalui tayangan berita yang bias gender. Perempuan masih dikonstruksikan dalam stereotipnya sebagai orang yang emosional, cerewet, sangat senang mengurus persoalan personal orang lain dan cengeng. Dalam dua periode tersebut, siaran informasi dan komunikasi yang sehat bagi publik perempuan yang seharusnya diproduksi sebagai wujud demokratisasi media, sangat jarang kita lihat. Yang terjadi, perempuan dilihat hanya sebagai konsumen. Dalam media online, perempuan banyak mendapatkan kekerasan dan *stereotyping*.

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa fungsi pers dalam era masyarakat digital ini yaitu sebagai “*watchdog*” yaitu mata dan telinga, pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini atau pendapat, dan mengarah agenda masa depan. Pers nasional juga mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (PWI Pusat, 1991:134). Dalam fungsinya sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), maka media dituntut memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Adapun dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, media dituntut melakukan pengawasan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparaturnegara, lembaga masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri.

Selama ini, berbagai kasus tindak kekerasan dan penghilangan nyawa kepada anak biasanya baru menarik perhatian publik tatkala peristiwa yang terjadi sudah masuk wilayah kriminal dan anak yang menjadi korban sudah jatuh celaka. Sikap masyarakat seperti ini tentu membuat upaya melindungi anak-anak dari risiko menjadi korban perlakuan buruk orangtua atau pelaku lain menjadi terlambat misalnya korban terlanjurtewas atau mengalami luka traumatik yang mendalam. Tidak hanya upaya mengutuk aksi kekerasan saja yang harus dilakukan melainkan perlu ada upaya preventif membangun kesadaran lingkungan terdekat dan masyarakat sekitar terhadap keselamatan anak-anak. Pembangunan kesadaran dan kewaspadaan melalui opini publik dapat dilakukan media massa melalui pemberitaan yang berbasis gender sesuai fungsinya sebagai sarana *mass education*.

4. Alternatif Solusi

a. Penggunaan *Gender Sensitive Indicators for Media* (GSIM)

Gender Sensitive Indicators for Media (GSIM) adalah serangkaian indikator yang bersifat *non-prescriptive* dan secara khusus dirancang untuk semua bentuk media. Indikator ini merupakan inisiasi

UNESCO yang dapat dimanfaatkan oleh media milik warga yang mengadvokasi kesetaraan gender, LSM, asosiasi media, serikat dan klub jurnalis, badan/ regulator media atau organisasi masyarakat sipil yang memberikan perhatian pada isu gender dan media. Penggunaan GSIM ini merupakan bukti atas pemahaman yang akurat dan utuh terkait kekerasan berbasis gender dalam beragam bentuk, sebagai kekerasan terhadap hak asasi manusia, yang diakui secara internasional dalam Deklarasi PBB mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 1993 (UNESCO, 2008). Salah satu fokus GSIM yang digunakan dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender di media massa terutama jurnalisme pers adalah sebagai berikut (AJI Indonesia, 2015:63-64) :

1. Pemakaian bahasa yang tidak menghakimi. Menahan diri untuk tidak menyalahkan korban/penyintas atas kejahatan yang dialami
2. Identifikasi orang-orang yang pernah mengalami kekerasan berbasis gender sebagai sumber, dengan persetujuan mereka.
3. Persentase kisah yang: 1) melanggar privasi dan/atau, 2) melecehkan martabat individu yang mengalami kekerasan berbasis gender/pilihan seks.
4. Penggunaan informasi serta statistik pendukung untuk menyajikan kekerasan berdasar gender sebagai masalah sosial, bukan tragedi individual dan personal.
5. Pencantuman informasi mengenai pihak-pihak/ organisasi yang dapat dihubungi bagi para individu yang terdampak kekerasan berbasis gender.
6. Proporsi waktu atau ruang, serta nilai penting dalam kisah kekerasan berbasis gender, dikaitkan dengan kisah lain.

Dengan mempedomani GSIM dalam penulisan berita terutama tentang kekerasan yang dilakukan oleh perempuan akan mendorong media mengambil peran agar isu-isu kesetaraan gender dapat dipahami masyarakat. Juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan dan praktiknya di internal media, sekaligus pijakan mengambil langkah penting untuk melakukan perubahan. Harapannya, organisasi media dapat memutuskan melalui mekanismenya sendiri, untuk mengadaptasi dan menerapkan indikator-indikator itu demi peningkatan mutu organisasi media dan jurnalisme.

b. Perlunya Jaminan Negara

Media merupakan salah satu klausul dalam pembahasan deklarasi *Beijing Platform for Action*, sebuah deklarasi internasional yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menumbuhkan kesetaraan, pembangunan, serta perdamaian dunia. Dalam Konferensi Regional Perempuan Beijing di Bangkok tahun 2014, serta konferensi yang sama di tingkat internasional di New York tahun 2015, stereotip perempuan di media merupakan salah satu pembahasan utama. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi yang diadakan PBB ini. Dalam putusannya, konferensi di tingkat regional Asia Pasifik kemudian mengeluarkan putusan untuk klausul perempuan dan media. Putusan tersebut berbunyi: “Pemerintah akan menjamin tidak adanya stereotip di media yang mengakibatkan pada diskriminasi terhadap perempuan di media.”

Merunut kondisi media di Indonesia serta komitmen pemerintah tentang ini, ada tiga persoalan yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki nasib perempuan melalui media. *Pertama*, pemerintah harus menjamin adanya partisipasi yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam media. *Kedua*, Pemerintah harus menjamin adanya perbaikan pada nasib buruh perempuan media. *Ketiga*, Pemerintah harus menjamin bahwa media tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi-politik pemilik media semata. Mengapa pemerintah harus menjamin soal ini? Dalam era konglomerasi hari ini, media yang digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi para pemiliknya sangat berorientasi pada pasar, karena ritme politik pemilik media selalu didukung oleh ritme ekonomi.

Logika ini kemudian juga melihat bahwa berita yang “besar” adalah berita yang mendatangkan banyak keuntungan, dan berita yang “kecil” adalah berita yang tidak mendatangkan *rating/share*, klik, dan oplah yang besar. Orientasi industri tampak di sejumlah media di Indonesia. Media online yang tumbuh dengan menyajikan berita yang menjual sensasi dan menjadikan perempuan sebagai objek berita. Di luar orientasi pasar yang sering didaku sebagai penyebab tayangan diskriminatif ini, media pertelevisian kita, terutama disetir pula oleh orientasi politik pemiliknya.

Sistem pers demokratis merupakan cita-cita bersama. Secara

umum, pers demokratis tidak menyerahkan mekanisme pers pada pasar, dan tidak menyerahkan keberuntungannya pada pemilik media yang hanya mencari keuntungan ekonomi dan pemilik media yang berpolitik. Negara seharusnya menjadi fasilitator keterbukaan masyarakat dan memfasilitasi berbagai regulasi serta penguatan regulator dalam konteks partisipasi masyarakat berperspektif gender dan menjamin independensi. Dengan demikian, berbagai persoalan masyarakat marjinal terutama isu gender seperti perempuan, anak, korban HAM, buruh/ nelayan miskin bisa masuk menjadi isu penting di media.

C. Simpulan

Media menggambarkan perempuan sebagai sosok yang “sempurna” yaitu pengasih, penyayang, pemaaf yang lupa akan segala kesakitan, penyesalan, kekesalan, kemarahan dan kelelahan. Konstruksi sempurna bagi perempuan oleh media menimbulkan pemberitaan yang bias gender ketika media memberitakan tindak kekerasan oleh perempuan. Media melakukan framing melalui pemilihan diksi, bahasa dan konstruksi berita disertai dengan bumbu kata-kata yang *bombastis* serta kontradiktif (kejam, tega, stress, dan lain-lain) sebagai pengingkaran. Konstruksi perempuan yang bias oleh media perlu dikoreksi karena media memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dalam masyarakat. Media perlu didorong menuju sensitif gender dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam sisi-sisi humanis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan perempuan. Perimbangan pemberitaan media dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan tanggungjawab keluarga serta masyarakat sekitar terhadap keselamatan anak-anak di lingkungannya, dan bukan hanya mengutuk atau mendiskreditkan tindakan pelaku kekerasan.

Penggunaan *Gender Sensitive Indicators for Media (GSIM)* sebagai pedoman penulisan pemberitaan yang sensitif gender akan mendorong media mengambil peran agar isu-isu kesetaraan gender dapat dipahami masyarakat. Juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan dan praktiknya di internal media, sekaligus pijakan mengambil langkah penting untuk melakukan perubahan. Diperlukan pula jaminan negara agar media tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi-politik pemilik media semata yang sangat berorientasi pada pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2015, *Indikator Sensitif Gender untuk Media edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta : AJI Indonesia
- Eryanto, 2002, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta : LKiS.
- Goc, Nicola, Juli 2009, *Framing the news : 'bad' mothers and the 'Medea' news frame*, Australian Journalism Issue. Volume 31 Issue 1 : 33-47. <http://eprints.utas.edu.au/9197/2/9197.pdf> diakses 31 agustus 2017
- Griffin, EM. 2012. *A First Look At Communicaton Theory. Eight Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Idntimes.com, 23 November 2016. Faiz Nashrillah, *Tega, Seorang Ibu di Palembang Tendang Anaknya Hingga Tewas*.<https://news.idntimes.com/indonesia/faiz-nashrillah/tega-seorang-ibu-di-palembang-tendang-anaknya-hingga-tewas/full>
- Imron A.M, A. & Nasucha, Y. (2009), *Gerakan Perempuan Kontemporer: Dari Koneksi ke Profesionalisasi* disajikan dalam siaran “Lembar sastra dan budaya” melalui RRI Surakarta. *Jurnal Warta*, 12(111), 98–108.
- Detiknews, 15 januari 2017. *Diduga Stres, Ibu di Medan Bunuh Anak Kandung Berusia 2,5 Tahun*.<https://news.detik.com/berita/d-3396534/diduga-stres-ibu-di-medan-bunuh->
- Hamad, Ibnu, 6 Oktober-November1999, *Media Massa dan Konstruksi Realitas*, Jurnal Pantau ISAI
- Kellner, Douglas, 1996, *Media Culture : Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Post Modern*, USA and UK: Westvie Press
- Kusuma, Rina Sari; Vitasari, Yuan, 2017, ”Gendering the Internet: Perempuan pada Ruang Gender yang Berbeda” , *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 14 (1):125-142

- Lips, Hilary M, 1993, *Sex and Gender: An Introduction*, London: Myfield Publishing Company.
- Faqih, Mansour, 2001, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Murniati, A.P, 1992, *Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan, Citra Wanita dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Kanisius
- McQuail, Denis, 2000, *Mass Communication Theories*. Fourth edition. London: Sage Publication
- Ortner, Sherry B, 1974, “*Is Female to Male as Nature is to Culture?*”, Dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (editor), *Women, Culture, and Society*, Stanford, CA: Stanford University Press
- P., Soemandoyo, 1999, *Wacana Gender dan Layar Televisi*, Yogyakarta: LP3Y – The Ford Foundation
- Piliang, Yasraf Amir, 2000, *Pers dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna, 2006, *Kajian Budaya Feminis : Tubuh, Sastra dan Budaya Pop*, Yogyakarta : Jalasutra
- PWI Pusat, 2016, *Wanita dan Pers Dukungan Terhadap Pembangunan Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka
- PWMI Jabar, 2015, *Pengertian, Fungsi dan Peran serta Perkembangan Pers di Indonesia*, <https://m.facebook.com/notes/pwmi-jabar/pengertian-fungsi-dan-peran-serta-perkembangan-pers-di-indonesia/1383142775250794/>
- Showalter, Elaine, 1989, *Speaking of Gender (ed)*, New York & London: Routledge.
- Siregar, Ashadi; Pasaribu, Rondang; Prihastuti, Ismay, 2002, *Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme*, Yogyakarta: LP3Y & Galang Printika.
- Siregar, Ashadi dkk (Ed.), 2000, *Media dan Gender, Perspektif Gender*

atas Industri Surat Kabar Indonesia, Yogyakarta: LP3Y – The Ford Foundation

Thornham, Sue, 2010, *Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi yang Belum terselesaikan* (terjemahan), Yogyakarta : Jalasutra

UNESCO, 2008, *Media Development Indicators :A framework for assessing media development* : Paris : UNESCO, <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf>

Geotimes.co.id. Bagong Suyanto, 6 oktober 2016. *Ketika Ibu Kandung Memutilasi Sang Buah Hati*. <https://geotimes.co.id/kolom/ketika-ibu-kandung-memutilasi-sang-buah-hati/>

Kompas.com - 15/01/2017. *Pretty Bunuh Anaknya Sendiri Diduga karena Depresi Ditinggal Suami*.<http://regional.kompas.com/read/2017/01/15/19521841/pretty.bunuh.anaknya.sendiri.diduga.karena.depresi.ditinggal.suami>, diakses tanggal 9 September 2017

kpai.go.id. 17 juli 2016. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*,<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, Diakses tanggal 28 agustus 2016

liputan6.com, 07 Agustus 2017. *Ibu Kejam, Simpan Bayi Kandungnya di Kulkas hingga Tewas*,<http://citizen6.liputan6.com/read/3049411/ibu-kejam-simpan-bayi-kandungnya-di-kulkas-hingga-tewas>